

ABSTRAK

Badan Informasi Geospasial (BIG) adalah transformasi lahir untuk menggantikan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) sebagai penuaian amanat pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG). UU ini disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 15 April 2011 dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 21 April 2011. Lahirnya BIG ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2011 mengenai Badan Informasi Geospasial pada tanggal 27 Desember 2011.

Dalam menjamin ketersediaan akses terhadap informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan, serta Menjamin ketersediaan akses terhadap informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial yang berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mendorong penggunaan informasi geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. maka dilihat dari aspek hukum, di pandang perlu untuk melakukan proses layanan dokumen hukum, Hasil pengamatan yang ada menunjukkan agar dapat memudahkan dan mempercepat pengolahan data, penyajian data yang tersistem.

Dari masalah-masalah yang ada tersebut, penulis berinisiatif untuk mengembangkan sebuah sistem informasi berbasis web untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada kegiatan operasional tersebut. Sistem informasi yang dikembangkan akan meliputi kegiatan layanan dokumen hukum Metode pengembangan sistem informasi tersebut akan menggunakan metode berorientasi obyek.

Dengan tersedianya sistem informasi tersebut, diharapkan Bagian Hukum Badan Informasi Geospasial dapat lebih mudah dalam mengelola arsip - arsip, dan memperoleh informasi lebih cepat dan akurat, serta mengurangi risiko terhadap kehilangan data.



ABSTRACT

Geospatial Information Agency (BIG) is a transformation born to replace the Coordinating Agency for Surveys and Mapping (BAKOSURTANAL) as a harvest mandate of Article 22 of Law No. 4 of 2011 on Geospatial Information (GI). This law approved by the Council of Representatives of Indonesia on 15 April 2011 and approved by the President of the Republic of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, on April 21, 2011. Marked by the signing of Birth BIG Presidential Regulation Number 94 of 2011 regarding the Geospatial Information Agency on December 27, 2011 .

In order to guarantee the availability of access to geospatial information that can be accounted for, as well as ensure the availability of access to geospatial information that can be accounted for, as well as realize the implementation of geospatial information efficiently (efficient) and effective (effective) through cooperation, coordination, integration, synchronization, and encourage the use of geospatial information in governance and in various aspects of community life. it is seen from the legal aspect, in view of the need to make the process legal document service, the existing observational results show in order to facilitate and speed up the data processing, data presentation tersistem.

Of the existing problems, the authors took the initiative to develop a web-based information system to resolve the problems that occur in such operations. Information systems developed will include legal document service activity information systems development method will use object-oriented methods.

With the availability of such information systems, is expected Geospatial Information Agency Legal Department can more easily manage archives - archives, and meperoleh information more quickly and accurately, as well as reducing the risk of data loss.